

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan pertanian membutuhkan SDM pertanian profesional, kreatif, inovatif, dan berwawasan global dalam rangka meningkatkan kemandirian pangan, nilai tambah, ekspor, dan kesejahteraan petani.

Untuk mewujudkan SDM pertanian yang dimaksud, perlu revitalisasi SDM pertanian melalui : (1) Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian; (2) Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian; (3) Revitalisasi Sistem Pendidikan Pertanian; (4) Pemberdayaan Kelembagaan Petani dan Usaha Tani; dan (5) Pemantapan Sistem Administrasi dan Manajemen BPPSDMP.

Revitalisasi Sistem Pendidikan Pertanian diarahkan untuk memenuhi tenaga fungsional RIHP dan tenaga teknis menengah pertanian, serta mempersiapkan wirausahawan muda di bidang pertanian.

Untuk mewujudkan tenaga fungsional RIHP maka perlu dirumuskan Perencanaan Strategis Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Medan Tahun 2010-2014 secara sistematis, terpadu, dan terukur.

B. Kondisi Umum Sumberdaya Manusia Pertanian

1. Aspek Pelaku Utama dan Pelaku Usaha

Kondisi petani saat ini sebagian besar berpendidikan SD ke bawah (81,7%) tingkat kepemilikan lahan yang relatif sempit (lebih kecil dari 0,5 Ha) dan 70% berumur di atas 50 tahun.

Pelaku usaha pertanian di pedesaan masih jauh ketinggalan dalam pengembangan produk primer, apalagi pengembangan produk olahan (hilir). Padahal nilai tambah pengembangan produk olahan lebih tinggi dari pengembangan produk primer.

2. Aspek Tenaga Fungsional RIHP

Kementerian Pertanian membutuhkan tenaga fungsional RIHP dengan kualifikasi pendidikan vokasi dan keahlian khusus di bidang RIHP dan jumlah kebutuhan tenaga fungsional RIHP belum dapat dipenuhi oleh Kementerian Pertanian, pemerintah provinsi termasuk pemerintah kabupaten/kota.

C. Potensi

1. Aspek Kelembagaan

Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Medan berdiri berdasarkan : Keputusan Presiden RI Nomor 58 Tahun 2002, tanggal 13 Agustus 2002, Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 549/kpts/OT.210/9/2002, tanggal 24 September 2002, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140/10/2008.

STPP Medan mempunyai dua Program Studi yaitu Penyuluhan Pertanian dan Penyuluhan Perkebunan yang telah terakreditasi masing-masing peringkat B dengan Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor 004/BAN-PT/Ak-VI/Dpl-IV/VIII/2009.

2. Aspek Ketenagaan

Pegawai Negeri Sipil (PNS) STPP Medan per 1 Januari 2013 berjumlah 80 orang, terdiri dari tenaga struktural 8 orang (1 orang eselon II, 1 orang eselon III dan 6 orang eselon IV), fungsional khusus 19 orang dan fungsional umum 53 orang. Jumlah PNS STPP Medan berdasarkan jenis kelamin, jenjang pendidikan dan golongan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. Jumlah PNS STPP Medan Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Uraian	Jumlah (Orang)	Keterangan
1.	Laki-laki	48	PNS
2.	Perempuan	32	PNS
Jumlah		80	

Tabel 2. Jumlah PNS STPP Medan Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah (Orang)	Keterangan
1.	S3	1	PNS
2.	S2	25	PNS
3.	S1/D IV	23	PNS
4.	D-III	4	PNS
5.	SLTA	25	PNS
6.	SLTP	1	PNS
7.	SD	1	PNS
Jumlah		80	

Tabel 3. Jumlah PNS STPP Medan Berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Jumlah (Orang)	Keterangan
1.	Gol IV	11	PNS
2.	Gol III	42	PNS
3.	Gol II	26	PNS
4.	Gol I	1	PNS

No.	Golongan	Jumlah (Orang)	Keterangan
	Jumlah	80	

D. Hasil yang Dicapai (Tahun 2005-2009)

1. Aspek Kelembagaan
 - 1.1. Penetapan Status Akreditasi Untuk 2 Program Studi (Penyuluhan Pertanian dan Penyuluhan Perkebunan) di STPP Medan dengan peringkat B.
 - 1.2. Penugasan kepada STPP untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan (diklat fungsional) bagi penyuluh pertanian berdasar Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 167/Kpts/KP.440/3/2007, dan penambahan Tupoksi untuk melaksanakan Diklat Fungsional RIHP Melalui PERMENTAN Nomor 48/Permentan/OT.140/10/2008.
2. Aspek Penyelenggaraan
 - 2.1. Wisuda bagi 275 orang lulusan dua program studi dari tahun 2005-2009.
 - 2.2. Tahun 2005 tidak ada lulusan karena peralihan APP menjadi STPP.
 - 2.3. Fasilitasi Beasiswa Supersemar kurun waktu 2005-2009 sebanyak 87 orang.
 - 2.4. Pemberian Bantuan Modal Usaha Bagi 15 Alumni STPP Medan sejumlah Rp. 318.600.000,-.
 - 2.5. Penyelenggaraan Diklat Fungsional RIHP yang dilaksanakan dari tahun 2008 sampai dengan 2009 berjumlah 469 orang.
 - 2.6. Penyelenggaraan Diklat THL-TBPP dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 sebanyak 7.022 orang.
 - 2.7. Diklat PUAP bagi Penyuluh Pendamping dan Pengurus Gapoktan tahun 2008-2009 sejumlah 2.559 orang
 - 2.8. Pendidikan alih program D-III ke D-IV wisuda tahun 2006 sebanyak 22 orang.
3. Aspek Ketenagaan
 - 3.1. Tugas Belajar dan izin belajar Program S1, S2 dan S3 :
 - a. Tugas Belajar : S2 sebanyak 5 orang, S3 sebanyak 2 orang.
 - b. Izin Belajar : S1 sebanyak 2 orang, S2 sebanyak 2 orang, dan S3 sebanyak 1 orang.
 - 3.2. Pengangkatan jabatan dosen tahun 2005-2009 sebanyak 10 orang.
 - 3.3. Peningkatan Kompetensi Dosen Sebagai Calon Widyaiswara 4 orang.
 - 3.4. Magang dari tahun 2005-2009 sebanyak 84 orang.
 - 3.5. Pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS 10 orang.



- 3.6. Penandatanganan Pakta Integritas oleh Pejabat Eselon III, IV dan Pejabat Fungsional 27 orang.
4. Aspek Kerjasama
 - 4.1. Bidang akademik : USU, UNIMED, Kanwil Agama, Koperasi, Puslit Karet dan PTP II, BPTP Sumut, Badan Ketahanan Pangan Sumut, BLPP, BBP2TP, BPTPH, dan Karantina Pertanian.
 - 4.2. Pengabdian masyarakat 14 Paket.
 - 4.3. Penyebaran informasi melalui Jurnal 6 Volume.
 - 4.4. Siaran Pedesaan tentang Informasi Pertanian melalui radio 52 minggu.
 - 4.5. Diklat fungsional Penyuluh Pertanian dengan :
 - a. Bapeluhtan Kab. Bener Meriah : 30 orang.
 - b. Bapeltan Riau : 60 orang.
 - c. Bapeltan Jambi : 73 orang.
 - d. Balai Diklat TPH Prov. Sumbar : 52 orang.
 - e. Bapeluh Kab. Kampar : 30 orang.
5. Perencanaan
 - 5.1. Penyusunan Renstra STPP Medan tahun 2006-2009.
 - 5.2. Penyusunan Rencana Aksi STPP Medan setiap tahun (2005-2009).
 - 5.3. Penyusunan Program dan Rencana Kerja (RKA-KL), TOR, dan RAB setiap tahunnya.
 - 5.4. Penyusunan Rencana Kerja (Renja 2005-2009) STPP Medan.
6. Keuangan
 - 6.1. Tersusunnya Laporan Sistem Akuntansi Instansi (Keuangan dan Neraca) dan Barang Milik Negara.
 - 6.2. Tersusunnya rekonsiliasi anggaran setiap bulan.
 - 6.3. Tersusunnya Sistem Informasi Manajemen Akuntansi & Keuangan (SIMAK) dan Sistem Informasi Manajemen Barang Persediaan.
 - 6.4. Terbinanya administrasi pengelolaan keuangan.
 - 6.5. Pengelolaan penerimaan PNBPN.
7. Sarana dan Prasarana
 - 7.1. Rehab rumah jabatan ketua STPP 250 m2.
 - 7.2. Rehab Mess 70 m2.
 - 7.3. Rehab Garasi Permanen 125 m2.



- 7.4. Rehab Asrama 150 m2.
- 7.5. Pembuatan Dinding Kolam 1500 m2.
- 7.6. Pembuatan tempat parkir sepeda motor 100 m2.
- 7.7. Pengerasan jalan laboratorium praktek 2.065 m2.
- 7.8. Pemasangan penangkal petir 4 unit.
- 7.9. Pembuatan gapura STPP 1 buah.
- 7.10. Perlengkapan sarana gedung, meubelair, pengadaan alat pertanian, perlengkapan asrama, peralatan multimedia, pengadaan komputer, laboratorium bahasa, dll.
- 7.11. Pengambilalihan kembali lahan praktek yang dikuasai masyarakat asrama Abdul Hamid seluas 6 Ha.
- 7.12. Pemanfaatan lahan praktek jurusan penyuluhan perkebunan seluas 4,5 Ha dan jurusan penyuluhan pertanian seluas 3 Ha.
- 7.13. Pembangunan gedung perpustakaan bertingkat 180 m2.
- 7.14. Pembuatan distance learning 400 m2.
- 7.15. Pembuatan Lath House 150 m2.
- 7.16. Pembuatan rumah jaga 12 m2.
- 7.17. Pembuatan bangunan Bokashi 70 m2.
- 7.18. Pembuatan saung sebanyak 2 unit.
- 7.19. Pembuatan website www.stppmedan.com
8. Evaluasi dan Pelaporan
 - 8.1. Terbentuknya Satuan Pelaksana (Satlak) Sistem Pengendali Intern (SPI).
 - 8.2. Tersusunnya Sistem Monitoring dan Evaluasi (Simonev) setiap bulannya.
 - 8.3. Tersusunnya laporan kegiatan STPP Medan setiap bulan.
 - 8.4. Tersusunnya laporan triwulan (setiap 3 bulan sekali) STPP Medan.
 - 8.5. Tersusunnya LAKIP STPP Medan setiap tahun.
 - 8.6. Tersusunnya laporan tahunan STPP Medan.

E. Permasalahan

1. Satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah diakui keberadaannya dan tetap dapat menyelenggarakan pendidikan formal, serta harus mengubah bentuk dan tatakelolanya sebagai Badan Hukum Pendidikan Pemerintah (BHPP), sesuai UU Nomor 9 Tahun 2009.



2. Kualitas dan kuantitas pendidik dan tenaga kependidikan masih belum memenuhi kualifikasi sebagai dipersyaratkan UU Nomor 14 Tahun 2005.
3. Belum terpenuhinya standar minimal ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan dan pembinaan kehidupan kampus.
4. Belum intensifnya pelaksanaan kerjasama dengan stakeholder.
5. Ketersediaan data primer mengenai tenaga fungsional RIHP belum seluruhnya diperoleh dan masih mengalami kendala. Selain itu terjadi proses transisi kelembagaan penyuluh dari yang lama menjadi kelembagaan yang baru sesuai dengan amanah undang-undang Nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (SP3K).

F. Tantangan

1. Menyelenggarakan program pendidikan tinggi vokasi dengan keahlian khusus RIHP untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kompetensi tenaga fungsional RIHP.
2. Mendorong tenaga teknis pertanian berstatus PNS dan berlatar belakang pendidikan SLTA untuk mengikuti pendidikan tinggi vokasi dengan keahlian khusus dibidang RIHP, dan setelah selesai pendidikan segera dialih fungsikan menjadi tenaga fungsional RIHP.
3. Meningkatkan kompetensi tenaga fungsional RIHP melalui program pendidikan dan pelatihan fungsional sesuai PP Nomor 101 Tahun 2001 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan PNS.
4. Menyelenggarakan pendidikan profesi Penyuluh Pertanian, sesuai amanat UU Nomor 16 Tahun 2006 tentang SP3K.
5. Mengubah bentuk dan tata kelola STPP Medan menjadi Badan Hukum Pendidikan Pemerintah (BHPP) sesuai amanat UU Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan.
6. Memenuhi sarana dan prasarana pendidikan dan pembinaan kehidupan kampus sesuai dengan standar optimal.
7. Meningkatkan kerjasama teknis pendidikan dengan lembaga pendidikan dan lembaga terkait lainnya.
8. Melaksanakan sertifikasi profesi penyuluh pertanian.



II. VISI DAN MISI STPP MEDAN

A. Visi STPP Medan

STPP Medan Terpercaya dalam menghasilkan tenaga fungsional Rumpun Ilmu Hayat Pertanian.

B. Misi STPP Medan

1. Menyiapkan status kelembagaan pendidikan kedinasan sesuai dengan peraturan perundangan.
2. Meningkatkan kompetensi ketenagaan pendidikan kedinasan pertanian.
3. Menyelenggarakan pendidikan kedinasan pertanian Diploma sesuai standar nasional pendidikan.
4. Menyusun dokumen norma, standar, pedoman dan kebijakan sesuai dengan aturan yang berlaku.
5. Meningkatkan pelayanan perkantoran.



III. TUJUAN DAN SASARAN

A. Tujuan

1. Terwujudnya status kelembagaan pendidikan kedinasan pertanian sesuai dengan peraturan perundangan.
2. Terwujudnya ketenagaan pendidikan kedinasan pertanian yang kompeten.
3. Terselenggaranya pendidikan kedinasan pertanian Diploma sesuai standar nasional pendidikan.
4. Terwujudnya dokumentasi norma, standar, pedoman dan kebijakan sesuai aturan yang berlaku.
5. Terwujudnya pelayanan perkantoran yang prima.

B. Sasaran

Berdasarkan visi, misi dan tujuan, maka ditetapkan sasaran strategis STPP Medan tahun 2010-2014 yaitu :

1. Tertatanya kelembagaan pendidikan kedinasan pertanian.
2. Terfasilitasinya ketenagaan pendidikan pertanian untuk meningkatkan kompetensi.
3. Terfasilitasinya tenaga fungsional yang mengikuti pendidikan Diploma.
4. Tersusunnya dokumen norma, standar, pedoman dan kebijakan (NSPK).
5. Terfasilitasinya pelayanan perkantoran.



IV. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

A. Arah Kebijakan

1. Pendidikan tinggi vokasi dilengkapi dengan penyusunan usulan pertimbangan, proposal, studi kelayakan, RIP, dan statuta untuk diusulkan sebagai bahan kemantapan lembaga.
2. Kompetensi ketenagaan pendidikan kedinasan pertanian diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan kedinasan pertanian Diploma.
3. Penyelenggaraan pendidikan kedinasan pertanian Diploma yang sesuai standar nasional pendidikan diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang kompeten.
4. Penyusunan dokumen norma, standar, pedoman dan kebijakan sesuai aturan yang berlaku untuk mendukung penyelenggaraan reformasi birokrasi.
5. Pelayanan perkantoran yang prima untuk mendukung Tridharma Perguruan Tinggi dan pelayanan kementerian pertanian.

B. Strategi

1. Menyusun rancang bangun kelembagaan pendidikan pertanian yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan program pembangunan pertanian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Meningkatkan Kompetensi ketenagaan pendidikan kedinasan pertanian melalui kegiatan magang, pendidikan, pelatihan, penelitian, pengabdian masyarakat, sertifikasi profesi, seminar, workshop dan studi banding.
3. Penyelenggaraan pendidikan kedinasan pertanian Diploma yang sesuai standar nasional pendidikan melalui penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan, pencapaian standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian pendidikan.
4. Menyusun dokumen norma, standar, pedoman dan kebijakan melalui pertemuan, rapat-rapat, workshop, pelatihan, pendidikan.
5. Memberikan pelayanan perkantoran yang prima melalui peningkatan profesionalisme SDM, administrasi yang tertib, penerapan Standar kegiatan, kehumasan dan kerjasama dengan stakeholder.



C. Program

Program yang dilaksanakan mengacu pada program eselon I Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian yaitu : Program Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani.

1. Penyusunan rancang bangun Kelembagaan Pendidikan Pertanian
2. Peningkatan kompetensi ketenagaan pendidikan kedinasan pertanian.
3. Penyelenggaraan pendidikan kedinasan pertanian Diploma
4. Penyusunan dokumen norma, standar, pedoman dan kebijakan
5. Peningkatan pelayanan perkantoran.

D. Kegiatan

1. Penyusunan rancang bangun Kelembagaan Pendidikan Pertanian
 - 1.1. Penyiapan dokumen pendirian, perubahan, dan penambahan unsur akademik
 - 1.2. Penyusunan Rencana Induk Pengembangan (RIP)
 - 1.3. Pengembangan kurikulum program studi baru
 - 1.4. Pemetaan calon mahasiswa program studi baru
 - 1.5. Pengembangan sarana dan prasarana program studi baru
 - 1.6. Penyempurnaan statuta
2. Peningkatan kompetensi ketenagaan pendidikan kedinasan pertanian
 - 2.1. Peningkatan profesionalisme tenaga structural dan fungsional (magang, studi banding, seminar, workshop, tugas belajar)
 - 2.2. Penyelenggaraan penelitian terapan
 - 2.3. Pengelolaan Jurnal Agrica Ekstensia
 - 2.4. Sertifikasi profesi
 - 2.5. Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat.
3. Penyelenggaraan pendidikan kedinasan pertanian Diploma
 - 3.1. Penyelenggaraan pendidikan vokasi (perencanaan perkuliahan, pelaksanaan perkuliahan, evaluasi)
 - 3.2. Penyelenggaraan penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan
 - 3.3. Pengembangan sarana dan prasarana pendidikan
 - 3.4. Pendataan alumni
 - 3.5. Kegiatan kemahasiswaan

- 3.6. Peningkatan kerjasama dengan stakeholder.
- 4. Penyusunan dokumen norma, standar, pedoman dan kebijakan
 - 4.1. Penyusunan dokumen perencanaan
 - 4.2. Penyusunan dokumen keuangan
 - 4.3. Penyusunan dokumen organisasi dan kepegawaian
 - 4.4. Penyusunan dokumen evaluasi dan pelaporan kegiatan revitalisasi pendidikan
 - 4.5. Penyusunan standar kegiatan
 - 4.6. Penyusunan dokumen pedoman
 - 4.7. Penyusunan dokumen kebijakan.
- 5. Peningkatan pelayanan perkantoran
 - 5.1. Penerapan system informasi manajemen
 - 5.2. Pengelolaan website
 - 5.3. Penyelenggaraan kehumasan dan kerjasama dengan stakeholder
 - 5.4. Penyelenggaraan administrasi yang tertib,
 - 5.5. Penerapan standar kegiatan.

E. Indikator Kinerja

Tabel 4. Indikator Kinerja

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT	OUTCOME
1. Penyusunan rancang bangun Kelembagaan Pendidikan Pertanian	1. Tersusunnya rancang bangun kelembagaan pendidikan pertanian	1. Tersedianya persyaratan kelembagaan pendidikan pertanian
1.1 Penyiapan dokumen pendirian, perubahan, dan penambahan unsur akademik	1.1. Tersusunnya dokumen pendirian, perubahan, dan penambahan unsur akademik 1 set	1.1. Tersedianya dokumen pendirian, perubahan, dan penambahan unsur akademik 1 set
1.2 Penyusunan Rencana Induk Pengembangan (RIP)	1.2. Tersusunnya Rencana Induk Pengembangan (RIP) 1 set	1.2. Tersedianya Rencana Induk Pengembangan (RIP) 1 set
1.3 Pengembangan kurikulum program studi baru	1.3. Tersusunnya 2 set kurikulum program studi baru	1.3 Tersedianya 2 set kurikulum program studi baru
1.4 Pemetaan calon mahasiswa program studi baru	1.4. Terlaksananya pemetaan calon mahasiswa untuk 2	1.4 Tersedianya peta calon mahasiswa 2 program studi baru



PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT	OUTCOME
<p>1.5 Pengembangan sarana dan prasarana</p> <p>1.6 Penyempurnaan statuta</p>	<p>program studi baru</p> <p>1.5. Terlaksananya pengadaan sarana prasarana program studi baru 10 paket</p> <p>1.6. Tersusunnya statuta 1 set</p>	<p>1.5 Tersedianya sarana prasarana program studi baru 10 paket</p> <p>1.6 Tersedianya statuta 1 set</p>
<p>2. Peningkatan kompetensi ketenagaan pendidikan kedinasan pertanian</p> <p>2.1 Peningkatan profesionalisme tenaga structural dan fungsional (magang, studi banding, seminar, workshop, tugas belajar)</p> <p>2.2 Penyelenggaraan penelitian terapan</p> <p>2.3 Pengelolaan jurnal Agrica Ekstensia</p> <p>2.4 Sertifikasi profesi</p> <p>2.5 Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat.</p>	<p>2. Terselenggaranya kegiatan peningkatan kompetensi ketenagaan pendidikan kedinasan pertanian</p> <p>2.1 Terlaksananya kegiatan peningkatan profesionalisme tenaga structural dan fungsional (magang, studi banding, seminar, workshop, tugas belajar) 25 paket</p> <p>2.2 Terselenggaranya penelitian terapan 40 paket</p> <p>2.3 Terkelolanya jurnal Agrica Ekstensia 10 volume</p> <p>2.4 Terselenggaranya proses sertifikasi dosen 23 orang</p> <p>2.5 Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat 20 paket</p>	<p>2. Meningkatnya kompetensi ketenagaan pendidikan kedinasan pertanian</p> <p>2.1 Tersedianya kegiatan magang, studi banding, seminar, workshop, tugas belajar 25 paket</p> <p>2.2 Tersedianya informasi hasil penelitian terapan 40 paket</p> <p>2.3 Tersedianya jurnal Agrica Ekstensia 10 volume</p> <p>2.4 Tersertifikasinya dosen 23 orang</p> <p>2.5 Tersedianya laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat 20 paket</p>
<p>3. Penyelenggaraan pendidikan kedinasan pertanian Diploma</p> <p>3.1 Penyelenggaraan pendidikan vokasi (perencanaan perkuliahan, pelaksanaan)</p>	<p>3. Terselenggaranya pendidikan kedinasan pertanian Diploma</p> <p>3.1 Terselenggaranya pendidikan vokasi (perencanaan perkuliahan, pelaksanaan perkuliahan,</p>	<p>3. Tersedianya pendidikan kedinasan pertanian Diploma</p> <p>3.1 Tersedianya pendidikan vokasi (perencanaan perkuliahan, pelaksanaan perkuliahan,</p>



PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT	OUTCOME
<p>ksanaan perkuliahan, evaluasi)</p> <p>3.2 Penyelenggaraan penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan</p> <p>3.3 Pengembangan sarana dan prasarana pendidikan</p> <p>3.4 Pendataan alumni</p> <p>3.5 Kegiatan kemahasiswaan</p> <p>3.6 Peningkatan kerjasama dengan stakeholder.</p>	<p>evaluasi) 595 mahasiswa</p> <p>3.2 Terselenggaranya kegiatan penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan 15 kegiatan</p> <p>3.3 Terselenggaranya pengembangan sarana pendidikan 16 paket, dan prasarana pendidikan 5 unit</p> <p>3.4 Terselenggaranya pendataan alumni 5 paket</p> <p>3.5 Terselenggaranya kegiatan kemahasiswaan 40 kegiatan</p> <p>3.6 Terselenggaranya kerjasama dengan stakeholder 5 kegiatan.</p>	<p>evaluasi) bagi 595 mahasiswa</p> <p>3.2 Tersedianya kegiatan penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan 15 kegiatan</p> <p>3.3 Tersedianya pengembangan sarana pendidikan 16 paket, dan prasarana pendidikan 5 unit</p> <p>3.4 Tersedianya data alumni 5 paket</p> <p>3.5 Tersedianya kegiatan kemahasiswaan 40 kegiatan</p> <p>3.6 Tersedianya informasi kerjasama dengan stakeholder 5 kegiatan.</p>
<p>4 Penyusunan dokumen norma, standar, pedoman dan kebijakan</p> <p>4.1 Penyusunan dokumen perencanaan</p> <p>4.2 Penyusunan dokumen keuangan</p> <p>4.3 Penyusunan dokumen organisasi dan kepegawaian</p> <p>4.4 Penyusunan dokumen evaluasi dan pelaporan kegiatan revitalisasi</p>	<p>4. Tersusunnya dokumen norma, standar, pedoman dan kebijakan</p> <p>4.1. Tersusunnya dokumen perencanaan 5 set</p> <p>4.2. Tersusunnya dokumen keuangan 5 set</p> <p>4.3. Tersusunnya dokumen organisasi dan kepegawaian 5 set</p> <p>4.4. Tersusunnya dokumen evaluasi dan pelaporan kegiatan revitalisasi pendidikan 5 set</p>	<p>4. Tersedianya dokumen norma, standar, pedoman dan kebijakan</p> <p>4.1. Tersedianya dokumen perencanaan 5 set</p> <p>4.2. Tersedianya dokumen keuangan 5 set</p> <p>4.3. Tersedianya dokumen organisasi dan kepegawaian 5 set</p> <p>4.4. Tersedianya dokumen evaluasi dan pelaporan kegiatan revitalisasi pendidikan 5 set</p>



PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT	OUTCOME
pendidikan 4.5 Penyusunan standar kegiatan	4.5. Tersusunnya standar kegiatan 1 set	4.5. Tersedianya standar kegiatan 1 set
4.6 Penyusunan dokumen pedoman	4.6. Tersusunnya dokumen pedoman 1 set	4.6. Tersedianya dokumen pedoman 1 set
4.7 Penyusunan dokumen kebijakan.	4.7. Tersusunnya dokumen kebijakan 1 set	4.7. Tersedianya dokumen kebijakan 1 set
5. Peningkatan pelayanan perkantoran	5. Terselenggaranya pelayanan perkantoran	5. Tersedianya pelayanan perkantoran
5.1 Penerapan system informasi manajemen	5.1. Terlaksananya system informasi manajemen 5 kegiatan	5.1 Tersedianya system informasi manajemen 5 kegiatan
5.2 Pengelolaan website	5.2. Terkelolanya website 1 unit setiap tahun	5.2 Tersedianya layanan website yang baik 1 unit setiap tahun
5.3 Penyelenggaraan kehumasan dan kerjasama dengan stakeholder	5.3. Terselenggaranya kehumasan dan kerjasama dengan stakeholder 5 kegiatan	5.3 Tersedianya kehumasan dan kerjasama dengan stakeholder 5 kegiatan
5.4 Penyelenggaraan administrasi yang tertib,	5.4. Terselenggaranya administrasi yang tertib di 21 unit/bagian	5.4 Tersedianya administrasi yang tertib di 21 unit/bagian
5.5 Penerapan standar kegiatan.	5.5. Terlaksananya standar kegiatan setiap tahun	5.5 Terlaksananya standar kegiatan setiap tahun

F. Rencana Anggaran 2010-2014

Tabel 5. Rencana Anggaran 2010-2014

NO	KEGIATAN	2010 (Rp)	2011 (Rp)	2012 (Rp)	2013 (Rp)	2014 (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Mengikat	7,502,795,000	8,324,699,750	9,187,699,738	10,093,849,725	11,045,307,211	46,154,351,424
2	Tidak Mengikat	8,935,300,000	8,935,300,000	8,935,300,000	8,935,300,000	8,935,300,000	44,676,500,000
	JUMLAH	16,438,095,000	17,259,999,750	18,122,999,738	19,029,149,725	19,980,607,211	90,830,851,424